

BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab satu ini akan membahas mengenai pendahuluan. Bab ini akan dibagi menjadi beberapa sub bab, antara lain sebagai berikut: latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka teoritik, hipotesa, tujuan penelitian, jangkauan penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan. Sub bab tersebut masing-masing akan dipaparkan sebagai berikut:

A. Latar Belakang Masalah

Pada saat ini kita tahu bahwa perhatian dunia sedang terpacu pada tragedi kemanusiaan yang terjadi di berbagai belahan negara. Prinsip-prinsip dari demokrasi dalam kehidupan politik ternyata tidak sejalan dengan persamaan hak dari etnis minoritas. Dan untuk kasus Rohingya, merupakan konflik etnis dan agama yang berujung pada tindakan diskriminasi terhadap etnis Rohingya yang dianggap melanggar hak asasi manusia, yang berujung pada pengusiran etnis Rohingya yang mendiami wilayah Rakhine, Myanmar yang berbatasan langsung dengan Bangladesh dikarenakan perbedaan etnis yang tinggal di Myanmar.

Sebagai salah satu minoritas di Myanmar, masyarakat Buddha menempati peringkat sebagai agama mayoritas, diikuti dengan muslim, kemudian Chin (Buddha, Kristen, Animis) dan angka paling kecil di duduki

oleh Kaman (juga Muslim, Mru, Khami, Dainet, Maramagyi). Myanmar merupakan negara yang kaya akan keragaman etnis, dan agama dan juga sumber daya alam minyak yang melimpah. Etnis yang paling dominan di Myanmar adalah Bamar, Shan, Kayni, Rakhine, Chinese, Mon, dan Kachin dan Budha sebagai agama yang paling mendominasi di Myanmar. Etnis Rohingya merupakan salah satu etnis yang tinggal di Myanmar yang beragama Islam, akan tetapi mereka tidak diakui sebagai warga negara Myanmar serta mengalami diskriminasi oleh pemerintah Myanmar.

Masyarakat Rohingya di Myanmar sebenarnya tidak bisa disebut 'Etnis' sepenuhnya karena tidak diakui keberadaannya oleh pemerintah terkait. Berawal hanya sebagai label politis yang digunakan untuk memperjuangkan keberadaan kelompok tersebut di Myanmar. Menurut sejarah, Rohingya disebut sebagai kaum minoritas Muslim yang tinggal di Arakan, namun tidak berjalan dengan harmonis dan menimbulkan konflik.

Pemerintah Myanmar pun menolak mengakui keberadaan etnis Rohingya di Myanmar. Mereka mengatakan bahwa etnis Rohingya bukan penduduk asli Myanmar. Pemerintah juga mengklasifikasikan etnis Rohingya sebagai imigran ilegal, meskipun telah lama tinggal di Myanmar (Agil Iqbal Cahaya, 2015). Pada Mei 2012, terjadi konflik antara etnis Rohingya dengan etnis Rakhine. Konflik tersebut bermula ketika beredar foto hasil forensik mengenai pembunuhan terhadap perempuan etnis Rakhine pada 28 Mei 2012 yang dilakukan oleh tiga pemuda etnis Rohingya yang membuat Para Bixu dan masyarakat etnis Rakhine membunuh etnis

Rohingya, merusak tempat ibadah, mengakibatkan 140ribu terusir dan 800 orang tidak mempunyai kewarganegaraan, 3000 bangunan rusak, dan hampir 60.000 orang kehilangan tempat tinggal dan terpaksa mengungsi ke Malaysia, Thailand dan Indonesia (2015).

Konflik antara Rohingya dan Rakhine sebenarnya sudah berlangsung sejak lama. Tetapi kerusuhan yang terjadi Juni 2012 lalu, kembali menyita perhatian dunia internasional. Etnis Rohingnya yang sudah bermukim di Myanmar sejak ratusan tahun lalu, terusmendapatkan perlakuan diskriminatif oleh Pemerintah Myanmar. Presiden Thein Sein pun tidak ingin mengakui kewarganegaraan dari etnis tersebut dan lebih memilih untuk mendeportasi mereka serta mengumpulkannya dalam tempat penampungan. (Nugraha, Analisi politik konflik Rohingya, 2015)

Ketegangan antara etnis Rohingya dengan etnis Rakhine yang mayoritas Budha semakin diperparah dengan adanya isu pembunuhan yang dilakukan oleh 3 orang pemuda Rohingya. Kabar simpang siur yang diberitakan oleh media dengan mudah menyulut konflik dan menyebabkan balas dendam antar etnis ini.

Pasukan militer, polisi menerapkan kebijakan mentarget Etnis Rohingya dengan bukti tidak bergerak untuk menghentikan pertikaian yang terjadi antar Etnis Rohingya dan Budha Rakhine. Hal itu terlihat dari statemen presiden Myanmar Jenderal Thein Sien kepada Komisioner Tertinggi Urusan Pengungsi Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNHCR) paska

kerusuhan dan pertikaian Juni 2012 lalu bahwa satu-satunya solusi penyelesaian konflik di Arakan adalah mengusir seluruh etnis Rohingya ke luar Rakhine/Arakan. Dan setelah itu banyak warga etnis Rohingya yang berusaha melarikan diri dengan menumpang perahu tradisional sepanjang 14 meter. Mereka berjejalan di atas perahu kayu dengan bekal seadanya. Akibat mesin perahu yang mereka tumpangi rusak, etnis Rohingya pun harus rela terkatung-katung di lautan yang ganas. Dan muncullah istilah Manusia Perahu tersebut.

Dan negara-negara yang menjadi tujuan suaka bagi para warga etnis Rohingya antara lain adalah Indonesia, Malaysia, Thailand, Bangladesh. Negara-negara ini melakukan desakan melalui banyak forum internasional kepada pemerintah Myanmar untuk menangani dan memikirkan solusi atas masalah ini. Namun dilain sisi hanya dapat sedikit campur tangan, contohnya adalah Bangladesh, yang banyak menerima pengungsi asal Arakan. Namun, dikarenakan ketutupan Negara Myanmar terhadap dunia internasional, dan penanggulangan yang cenderung pasif, tidak banyak yang bisa dilakukan oleh Negara luar untuk membantu masalah ini. Walaupun organisasi PBB dan negara-negara lain telah meminta pemerintah Myanmar untuk merubah sikap mereka terhadap warganya, mereka cenderung tidak mau merubah sikapnya yang diktator. Dan sampai saat ini keberadaan warga minoritas etnis Rohingya tidak diakui oleh pemerintah Myanmar sebagai salah satu etnis asli Myanmar. Dan terkesan tidak di inginkan di negara mereka sendiri.

Setelah Myanmar merdeka dan U Nu berkuasa, kemudian berdiri organisasi BMC. The Burma Muslim Congress (BMC) adalah organisasi yang berdiri untuk memperluas nasionalisme Myanmar tetapi tidak didirikan sebagai organisasi agama. U Nu membuat keputusan “anti Muslim”, agar organisasi The Burma Muslim Congress (BMC) meninggalkan AFPFL (organisasi anti rasis) pada April 1948. Hal tersebut karena BMC dianggap sebagai organisasi agama dan aktifitasnya tidak sama dengan tujuan politik AFPFL. Tujuan awal BMC adalah untuk memperkuat nasionalisme Myanmar dilingkungan orang-orang muslim, termasuk khususnya kaum imigran. Realitas sosialitas saat itu memperlihatkan bahwa di lingkungan imigran muslim ada yang berorientasi mendukung nasionalisme Pakistan berpisah dari India, hal tersebut menjadikan BMC bukan lagi sebagai organisasi keagamaan. Sebagian pemimpin BMC menentang dan membangun organisasi baru yaitu Burma Muslim League (BML).

Masalah yang muncul adalah tentang legalitas atas status kependudukan Rohingya di Myanmar. Hukum kewarganegaraan yang berlaku di Myanmar semakin ketat dan kompleks. Pada tahun 1982, Myanmar mengeluarkan undang-undang tentang kewarganegaraan yang intinya menciptakan tiga kelas warga, yaitu warga negara penuh (diberi hak penuh warga negara Myanmar), warga negara asosiasi (warga negara gabungan dari warga lain), dan warga negara naturalisasi (warga asli).

Warga Rohingya tidak termasuk dalam salah satu dari tiga kategori kewarganegaraan tersebut.

Undang-undang kewarganegaraan Myanmar tahun 1982 secara langsung mengatur tentang kendali Pemerintah junta militer Myanmar dalam memberikan status kewarganegaraan ataupun menghapus status kewarganegaraan warga negaranya dan ini didukung dengan partai politik dan para biksu garis keras yang ingin etnis Rohingya diusir dari Myanmar.

Pemerintah Myanmar menolak desakan internasional, maupun tekanan dari internasional, agar ikut memikirkan solusi atas pelarian ribuan warga etnis Rohingya dan tindakan diskriminasi yang dilakukan oleh pemerintah junta militer. Tekanan yang berasal dari dalam dan luar negeri pun didapatkan dari organisasi-organisasi di dunia tidak di tanggapi oleh pemerintah Myanmar sendiri.

Negara mayoritas Buddha itu malah menyatakan tidak akan pernah mengakui dan adanya kepentingan dan alasan apa dibalik kebijakan diskriminatif yang tetap dijalankan oleh pemerintah Myanmar walaupun ada tekanan yang berasal dari luar akan dibahas didalam penelitian ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas penulis merumuskan suatu pokok permasalahan sebagai berikut: *“Mengapa pemerintah Myanmar tetap mendiskriminasi etnis Rohingya ditengah tekanan internasional yang tinggi?”*

C. Landasan Teori

Teori Sistem Politik

Dalam penulisan skripsi ini, peneliti menggunakan teori Sistem politik oleh David Easton. Pada tataran ini teori sistem politik digunakan untuk menganalisis alasan mengapa pemerintah Myanmar tetap diskriminatif terhadap etnis Rohingya walaupun mendapat tekanan dari internasional. Hal tersebut dapat digunakan sebagai kerangka dasar pemikiran untuk menjelaskan permasalahan yang ada.

Pengertian dari teori sistem itu sendiri adalah:

as a series of statement about relationship among independent and dependent variable wich change in one or more variable are accompanied, or combination of variable followed by change in other variable of combination variable. (Dougherty & L.P, Jr)

Teori sistem adalah serangkaian variabel yang saling berkaitan, dan saling mempengaruhi antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya, begitu pula sistem politik yang ada di suatu negara.

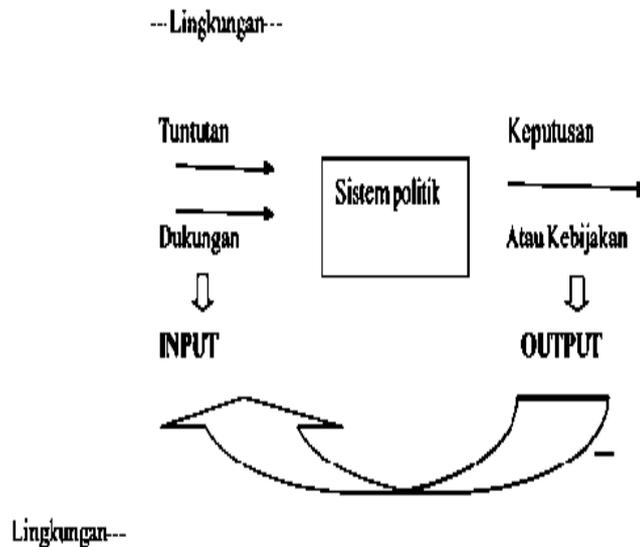
Studi politik berusaha memahami bagaimana sebuah keputusan atau kebijakan yang sah dibuat serta dilaksanakan oleh suatu negara. Dengan menggunakan teori ini, kita juga dapat memahami fungsi dari lembaga-lembaga yang ada di dalam suatu negara tersebut, seperti partai politik, kelompok kepentingan, lembaga pemerintah, serta memahami praktek-praktek politik yang terjadi, guna memperoleh gambaran kasar apa yang terjadi dalam setiap unit politik.

Adanya berbagai macam input, dianggap sebagai satu hal yang dapat terus menjamin keberlangsungan suatu sistem. Input-input tersebut kemudian diproses di dalam sistem politik menjadi output. Berbagai macam output ini lah yang nantinya menimbulkan pengaruh terhadap sistem itu sendiri, maupun lingkungan dimana sistem itu berada. Secara sederhana dapat digambarkan dengan bentuk diagram;

Model Analisa Sistem Politik yang diungkapkan oleh David Easton

(Mas'ood & Mac Andrews, 1996)

Model Analisa Sistem Politik yang diungkapkan oleh David Easton



Dalam menganalisa kebijakan pemerintah Myanmar, yang tetap menjalankan tindakan diskriminatif walaupun mendapat tekanan dari internasional, peneliti akan menggunakan teori sistem milik David Easton ini. Dengan penjelasan:

A. Input

Dari diagram di atas, terlihat ada dua jenis pokok input yang menjadi bahan utama sistem politik, yaitu tuntutan dan dukungan. Dalam kasus ini input yang berupa dukungan berasal dari dalam negeri dan tuntutan datang dari internasional.

Pertama, dukungan yang berasal dari dalam negeri Myanmar sendiri datang dari pemerintah junta militer. Dukungan juga datang dari para biksu

garis keras, desakan untuk mengusir etnis Rohingya dari Myanmar pun didapat dari kelompok Buddha garis keras, yang bernama Ma Ba Tha (*Committee for the Protection of Nationality and Religion*) yang dipimpin oleh biksu Ashin Wirathu

Kedua, tuntutan datang dari dunia internasional terhadap dukungan kelompok politik Myanmar untuk melakukan tindakan diskriminatif. Tuntutan dilihat dari banyaknya negara yang mengecam dan memberikan *statment* kepada pemerintah Myanmar terkait tindakan diskriminatif. Tuntutan juga datang dari OKI (Organisasi Kerjasama Islam) dan UNHCR (*United Nations High Commissioner for Refugees*) terkait dengan pengungsi etnis Rohingya.

B. Sistem Politik

Sistem politik atau proses politik merupakan suatu proses yang dilakukan oleh pemerintah dalam kaitannya untuk menanggapi segala macam bentuk input yang telah masuk ke pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah Myanmar tidak mempertimbangkan secara matang tuntutan yang berasal dari internasional. Proses yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar, sangatlah menentukan output yang berupa kebijakan.

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang mejadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan oleh pemerintah, organisasi, dan kelompok sektor swasta, serta individu. Kebijakan berbeda dengan

peraturan dan hukum. Jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku (misalnya suatu hukum yang mengharuskan pembayaran pajak penghasilan), kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan. Kebijakan atau kajian kebijakan dapat pula merujuk pada proses pembuatan keputusan-keputusan penting organisasi, termasuk identifikasi berbagai alternatif seperti prioritas program atau pengeluaran, dan pemilihannya berdasarkan dampaknya (2015).

Kebijakan yang diambil oleh pemerintahan Junta Militer dirasakan mendiskriminasi etnis Rohingya dimulai diskriminasi di berbagai aspek seperti politik, sosial dan juga ekonomi turut menjadi sasaran kebijakan Junta Militer. Junta Militer sendiri adalah suatu bentuk pemerintahan diktator militer, yang biasanya dipimpin oleh perwira militer yang berpangkat tinggi. Pemerintahan ini biasanya hanya dikuasai oleh satu orang perwira yang mengendalikan hampir segala-galanya. (2015)

C. Output

Output merupakan hasil dari masuknya berbagai macam input ke dalam ruang sistem politik. Sistem politik memiliki arti penting untuk masyarakat karena mengeluarkan suatu keputusan yang mengikat, yakni suatu kebijakan. Kebijakan inilah yang memiliki kekuatan karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Dari situlah pentingnya proses pengambilan suatu kebijakan.

Myanmar sendiri mengambil kebijakan diskriminasi terkait dengan kepentingan Myanmar dalam hal energi dan sumber daya minyak. Myanmar memutuskan untuk melakukan kerjasama dengan China. Keputusan ini berupa penandatanganan MoU pembuatan Pipa Shwe yang berada di wilayah Arakan, Myanmar.

Kebijakan yang mendiskriminasi ini menjadikan kebijakan ini mempunyai dampak negatif bagi etnis Rohingya itu sendiri dan pandangan dari dunia internasional. Keterkaitan antara variable yang satu dengan variable yang lain yaitu input dan output sering disebut sebagai umpan balik atau *feedback*. Sehingga kebijakan tersebut akan berpengaruh dan dipengaruhi oleh lingkungan domestik maupun internasional.



Dengan adanya diskriminasi di Myanmar seperti diskriminasi politik, diskriminasi sosial dan budaya, serta pencabut kewarganegaraan dan dengan adanya dukungan dari masyarakat Buddha Myanmar dan lebih spesifik lagi kelompok Buddha garis keras yang disebut Ma Bha Tha, sehingga pemerintah Myanmar mengambil kebijakan diskriminasi terhadap Rohingya dengan tetap mendiskriminasikan etnis Rohingya didukung dengan masyarakat Buddha itu sendiri.

D. Hipotesa

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat ditarik hipotesa bahwa kebijakan diskriminatif yang diambil oleh pemerintah Myanmar dikarenakan oleh adanya dukungan dari para biksu radikal yaitu Ma Bha Tha dan adanya kepentingan untuk membuka jalur pipa Shwe di wilayah Arakan, Myanmar.

E. Metode Penelitian

1. Tipe penelitian

Tipe penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif yaitu dengan menggambarkan fenomena yang terjadi dan untuk mengetahui sebab-sebab diskriminasi yang terjadi di Jerman.

2. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis ialah telaah pustaka, yaitu cara pengumpulan data dengan menelaah sejumlah literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti baik berupa buku, jurnal, dokumen, makalah, laporan majalah, surat kabar dan artikel serta internet.

3. Jenis data

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur.

4. Teknik analisis data

Teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif, dengan menggambarkan permasalahan yang ada kemudian menganalisisnya melalui keterkaitan antara konsep dan fakta-fakta yang ada.

5. Metode penelitian

Metode penulisan yang penulis gunakan adalah metode deduktif, yaitu dimana penulis menggambarkan masalah secara umum kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus

F. Jangkauan Penelitian

Penelitian mengenai alasan pemerintah tetap menjalankan diskriminatif terhadap etnis Rohingya walaupun tekanan internasional tinggi mengambil jangkauan bersifat observasi dengan mengamati apa saja alasan dari pemerintah Myanmar tetap diskriminatif terhadap Rohingya walaupun tekanan internasional tinggi dengan melalui beberapa sumber media seperti situs dan pemberitaan media cetak sehingga penulis akan mendapatkan dasar analisa dari kasus tersebut.

G. Sistematika Penulisan

Bab I. Dalam bab ini berisi antara lain: judul, latar belakang masalah, landasan teori, hipotesa, metode penelitian, jangkauan penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II membahas problematika etnis yang ada di Myanmar.

BAB III merupakan bab yang membahas tentang kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Myanmar terhadap etnis Etnis Rohingya diwujudkan melalui bentuk-bentuk tindakan diskriminatif.

BAB IV merupakan bab pembuktian hipotesa yang membahas tentang alasan dari pemerintah Myanmar tetap mendiskriminasikan Rohingya yang mengganggu kepentingan pemerintah junta militer dalam pembuatan Pipa Shwe di Arakan, Myanmar dan disamping itu adanya tuntutan dari Ma Bha Tha sebagai gerakan Buddha garis keras.

BAB V merupakan bab yang berisi kesimpulan dari uraian pembahasan bab-bab sebelumnya.

